

GERAKAN RADIKALISME AGAMA; PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

M. Ahyar Fadly

Institut Agama Islam (IAI) Qamarul Huda Lombok Tengah
fadlyahyar01@gmail.com

Abstract

In many cases, it was identified that the role of religion—particularly as a strategy to legitimize the struggle and mobilize mass support, very dominant. Several studies have found various radical action, violence and conflict in the world triggered by the actions and the concept of interpretation and understanding of religion, such as the dispute between the Catholic and Christian faiths in Northern Ireland; Bosnian Muslims, Orthodox Serbs and Catholic Croats in the Balkans; Tamil and Sinhalese in Sri Lanka; Christians and Muslims during the civil war in Lebanon; Sunni's and Shi'ies in post-Saddam Iraq; including some cases in Indonesia. This phenomenon sparked interest in the authors to examine radicalism social science perspective with a focus on the concept of social action, the concept of interpretation and understanding (interpretative understanding or *verstehen*), which is realized through the actions of actors and understanding the motives of the action actor. From research using descriptive-analytic study concluded that the movement of religious radicalism and the like caused by dissatisfaction with individuals or groups who disguised by language and religious symbols and used to obtain political and economic power.

Keywords: *Radikalism, Ethnic cleasing, Islamic state, Modernization*

Pendahuluan

Dua kali serangan bom atau teror ke Paris Perancis membuat dunia semakin gusar dan terus mencari kambing hitam, tak tanggung-tanggung PBB merespon serius dan secara resmi mengumumkan pernyataan perlawanan terhadap terorisme dengan segala variannya dan menjadi musuh dunia. Jauh sebelum itu, sekadar untuk mengingat kembali tentang serangan teroris 9/11 terhadap World Trade Center (WTC) dan Pentagon. Bermuara dari itu, teror telah mengubah abad kedua puluh satu menjadi dunia yang didominasi perang melawan terorisme global di bawah komando Amerika Serikat. Mereka juga memperkokoh citra Islam dan Muslim sebagai agama dan masyarakat yang harus ditakuti dan dilawan.

Melekatkan agama sebagai satu varian potensial pemicu tindakan radikal atau kekerasan adalah hal yang sulit. Hal ini, karena agama dianggap sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran penuh dengan nilai kearifan, kedamaian, dan keselamatan. Dalam setiap tindakan radikal yang berwujud kekerasan terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, kehancuran, dan kematian. Tindakan radikal yang dilakukan oleh Imam Samudra cs misalnya, dengan semangat jihadnya telah memunculkan kontradiksi dan sinisme dari internal penganut Islam. Wajah sejuk agama sangat tidak mungkin dilekatkan dengan segala tindakan radikal apalagi sampai berakibat penghancuran dan kematian menggenaskan.

Tindakan radikal atau kekerasan dengan label agama seringkali diterjemahkan oleh sebagian orang sebagai *legal doctrine* yang harus dilaksanakan. Pembolehan (*permissiveness*) terhadap bentuk tindakan radikal atau kekerasan resmi terus ditoleransi dan bahkan disetujui.¹ Pada saat yang sama, toleransi terhadap pelbagai bentuk kekerasan semakin berkurang. Tampaknya, tidak selalu jelas pada situasi mana kekerasan bisa dipandang sebagai

¹ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 43

penyimpangan dan pada situasi mana dianggap bukan penyimpangan. Faktasitasnya, situasi yang sama bisa berlaku bagi dua pandangan oleh orang yang berbeda.

Tindakan beberapa bentuk kekerasan, seperti terorisme atau penjabalan (*mugging*) yang disinyalir dilakukan oleh kelompok radikal terus menebar ancaman dan memakan korban. Sepanjang Tahun 2015, dunia dikejutkan dengan bom bunuh diri di Perancis, terakhir terjadi di gedung konser yang memakan korban 153 orang dan ratusan orang masih dirawat. Di Indonesia sendiri, teror dan tindakan radikal kerap kali muncul dalam pelbagai bentuknya, seperti pengrusakan tempat ibadah, fasilitas umum, bom bunuh diri di Bali dan J Marriot Hotel Jakarta, dan aksi teror Sarinah.

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, sebagaimana kelompok ISIS dan lainnya sering lakukan; dan kekerasan defensif jauh lebih menonjol dari kekerasan agresif. Perilaku teror dan mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, namun berupaya agar bisa mengontrol orang lain. Max Weber (1958) menganggap teror dan ancaman sebagai bentuk kekerasan dan merupakan unsur penting kekuatan (*power*), kemampuan untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan yang berlawanan.² Teroris seringkali mendemonstrasikan keinginannya untuk mewujudkan ancamannya.

Perilaku kekerasan tidak muncul dari ruang hampa, tetapi lahir sebagai reaksi kolonialisme di Eropa. Kekerasan bisa juga muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar orang (*interpersonal conflict*), antar kelompok (*inter-group*), kelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antar negara (*inter-state conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.

² Max Weber, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 103

Harvey Greisman menunjukkan bahwa kekerasan berkaitan dengan gagasan dasar kita tentang hubungan dominasi yang *legitimate* dan tidak *legitimate*. Seringkali perilaku yang sama didefinisikan berbeda, tergantung pada perilaku tersebut dilakukan oleh seorang revolusioner, radikal atau petugas resmi. Greisman lebih lanjut menjelaskan bahwa perbedaan simbolik ini dibuat karena kekuatan negara secara tersirat dianggap *legitimate* dan rasional; sementara orang lain *unlegitimate*.³ Israel selama ini tidak akan dianggap oleh dunia (terutama AS dan sekutunya) sebagai *unlegitimate* terhadap tindakannya melakukan teror dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun.

Trend revivalisme Islam yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan di dunia Arab-Islam, berkelindan dengan pelbagai gagasan dan tindakan yang terjadi di dunia. Perdebatan mengenai political Islam dan Islam religious menjadi titik startnya. Islam Politik, yang kemudian dipahami sebagai Islam fundamentalis⁴ atau Islam radikal merupakan wacana yang menarik diamati. Kebangkitan fundamentalisme harus dilihat berdasarkan latar belakang kemunculan masyarakat post-tradisionalis.

Secara umum, fundamentalisme muncul sekurang-kurangnya pada dekade 1950-an. Strategi perjuangan Islam Politik menginginkan institusionalisasi Islam dalam bentuk negara Islam, misalnya di Indonesia ada DI/TII, HTI, JAT, dan FPI kemudian di-

³ Thomas Santoso, *Teori-teori...*

⁴ Sebelum serangan terhadap WTC dan Pentagon, fundamentalisme Islam adalah istilah yang lazim digunakan untuk mengidentifikasi Islam radikal. Pasca 11/9 menggunakan istilah yang lebih spesifik yaitu Islam Wahabi dan Islam Salafy. Wahabi dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang pemuka agama abad XVIII dan pemimpin gerakan sosio-moral untuk pembaharuan masyarakat; yang membentuk aliansi dengan kepala suku Muhammad ibn Saud yang menjadi basis Arab Saudi. Salafy merupakan gerakan yang menyebar ke luar Arab Saudi dan Teluk. Islam Salafy mencerminkan tuntutan untuk kembali ke Islam yang murni seperti dijalankan kaum Muslim generasi pertama (salaf = orang-orang terdahulu).

hadapkan dengan strategi perjuangan Islam kultural yang mementingkan pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam di masyarakat. Belakangan ini, kalangan NU mengemukakan istilah Islam Nusantara dan menjadi tema Mu'tamar NU di Jombang. Eksistensi Islam Nusantara masih menjadi perdebatan sampai saat ini.

Tentu saja, Gus Dur dalam perjuangannya di Indonesia selama ini selalu berada pada posisi terus menghidupkan dan mendorong nilai-nilai agama dijalankan masyarakat. Atau dalam bahasa lain, “menghadirkan Tuhan” dalam kehidupan kongkret-historis merupakan perkara umum dan penting bagi kaum muslim, setidaknya bagi Gus Dur sendiri. Gerakan ini yang disebut “gerakan kultural”. Menurut konsep ini, masyarakat Muslim harus mampu mengakrabi budaya di sekitarnya, karena prinsip universal dalam ajaran Islam mengharuskan mereka untuk mengakomodir budaya partikular yang hidup di tempat tinggal mereka.⁵ Pandangan ini dimaksudkan agar kehadiran Islam bisa membawa serta keramahan dan kedamaian kepada lingkungannya.

Permasalahannya, bagaimana memahami tindakan radikalisme, atau fundamentalisme Islam (politik) agama? Bagaimana agama selalu dilabelkan dengan gerakan-gerakan radikalisme atau terorisme global? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dianalisis menggunakan pisau analisis ilmu sosial khususnya “teori tindakan sosial Max Weber.

Membaca Radikalisme Agama dengan Teori Tindakan Sosial

Dengan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan terhadap fenomena radikalisme agama, seperti peristiwa 11/9, bom Paris Prancis, dan lainnya dapat dijelaskan secara memadai. Teori tindakan sosial Max Weber misalnya dapat digunakan menjelaskan mengapa tindakan radikal menjadi pilihan kelompok garis

⁵ Toha Hamim, “Konflik Dalam Perspektif Komunitas Beragama di Indonesia,” dalam *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Ed) Toha Hamim, dkk, (Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Sosial IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007), 15

keras. Tokoh utama teori Tindakan Sosial adalah Max Weber. Ia lahir tahun 1864 dari keluarga Borjuis Jerman. Ayahnya seorang anggota Parlemen dari Partai Liberal Jerman. Namun demikian, ia menjadi korban hubungan disharmonis dari ayah dan ibunya. Weber sendiri merupakan pendiri Partai Demokrat Jerman (*Deutsche Demokratische Partie*). Hal ini membuktikan ketertarikannya pada dunia politik di Jerman, karena itu, pengalaman itu akan berpengaruh terhadap pemikiran sosiologinya.

Max Weber memiliki jasa besar dalam mengkonstruksi teori tindakan sosial (*social action*). Ada dua konsep dasar yang diperkenalkan Weber yaitu yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman (*interpretative understanding* atau *verstehen*) yang menyangkut metode untuk menerangkan konsep tindakan sosial. Dalam hal ini, akan mencoba menginterpretasikan tindakan si aktor; memahami motif dari tindakan si aktor.

Weber menciptakan tipe ideal tindakan sosial untuk memahami pola dalam sejarah dan masyarakat kontemporer. Ia menciptakan tipe ideal tindakan, hubungan sosial, dan kekuasaan (*power*). Tindakan individu, ia klasifikasi menjadi empat tipe, yaitu ⁶ *zwecrational*, *wertrational action*, *affectual action*, dan *traditional action*.⁷ *Zwecrational* berkaitan dengan *means and ends*, yaitu tujuan-tujuan (*means*) dicapai dengan menggunakan alat atau cara (*ends*). *Wertrational* adalah tindakan nilai yang orientasi tindakan tersebut berdasarkan pada nilai atau moralitas. Tindakan afektif individu didominasi oleh sisi emosional, dan tindakan *traditional* adalah tindakan pada suatu kebiasaan yang dijunjung tinggi, sebagai sistem nilai yang diwariskan dan dipelihara bersama. Atau dengan kata lain, *traditional actions* adalah tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan mengerjakan sesuatu di masa lalu.

⁶ Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa Penilaian Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 49

⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38

Selalu ada kepentingan alamiah dalam setiap diri manusia, dan pada konteks ini Weber sejalan dengan filsafat Marx. Kepentingan alamiah inilah yang mendorong manusia untuk terus bergerak mencapai kekayaan (*wealth*) serta menciptakan tujuan-tujuan penting dan nilai-nilai dalam masyarakat. Namun, Weber tidak sepakat dengan apa yang dipikirkan Marx tentang determinisme ekonomi, dan menyebut sosiologinya sebagai sosiologi empiris.⁸ Sementara itu, Turner (1999) menyebut perbedaan teoritis antara Weber dan Marx terlihat dari komitmen metodologi Weber yang mengikuti individualisme sebagai perspektif interpretatif pada tindakan sosial; sedang Marx mengacu pada epistemologi realis, strukturalisme, dan materialisme sejarah sebagai ilmu pengetahuan dari cara produksi.⁹

Sebagian ilmuwan sosial tidak salah jika menempatkan Weber sebagai seorang teoritikus *micro analysis*, jika hanya berangkat dari tindakan sosial. Faktisitasnya begitu, tetapi Weber, menurut Novri Susan (2009), juga memberi analisis tentang masyarakat, bahkan menjangkau lebih luas dari definisi kelas ala Marx.¹⁰ Dengan memberikan konsep sosiologis kelas yang lebih komprehensif. Stratifikasi sosial tidak hanya ditentukan oleh ekonomi semata melainkan ditentukan juga oleh status (*prestige*) dan kekuasaan politik (*power*).

Konflik-konflik atau tindakan radikal muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi adalah posisi yang layak diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Karenanya, relasi-relasi sosial manusia diwarnai oleh usaha-usaha untuk meraih posisi tinggi dalam stratifikasi sosial yang diwarnai dan diwujudkan melalui tindakan *zweckrational* dari tipe ideal tindakan Weber.

⁸ Karl Lowith, *Max weber and Karl Marx*, (London and New York: Routledge, 1993), 121

⁹ Bryan Turner, *Classical Sociology*, (London: Sage Publication, 1999), 50

¹⁰ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 1999), 74

Memahami tindakan radikal menggunakan jasa teori tindakan sosial, dimaksudkan untuk menginterpretasikan, menjelaskan tindakan-tindakan pelaku, dan memahami rasionalitas di balik tindakan pelaku tersebut. Di posisi inilah tugas seorang Ilmuwan Sosial menurut Weber.

Agama dan Gerakan Radikalisme: Aksi dan Reaksi

Merebaknya Islam phobia dengan pelbagai bentuknya di dunia Barat adalah wujud reaksi atas tindakan-tindakan teror, kekerasan, dan malapetaka yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama. Tindakan teror yang dilakukan ISIS dengan korban yang terus berjatuhan membuat Amerika dan sekutunya seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah menyatakan perang melawan ISIS. Selama serangan dilancarkan ke basis ISIS, gelombang imigran dari Timur Tengah ke negara-negara Barat, seperti Amerika, Jerman, Inggris, dan Prancis semakin diperketat. Silang pendapat warga Amerika yang mendesak agar Presiden Obama menolak imigran—khususnya yang beragama Islam, membuat sang Presiden galau, walaupun desakan warga itu tidak sampai memunculkan reaksi berkelanjutan.

Andai saja, aksi itu berlanjut, maka sangat mungkin akan memunculkan reaksi dari warga Amerika yang beragama Islam khususnya dan Muslim dunia umumnya. Dalam konteks politik global, dunia akan menghakimi Amerika sebagai negara yang tidak konsisten dan berdampak negatif terhadap hubungan multilateral khususnya dengan negara-negara teluk yang mayoritas Muslim dan kaya minyak. Untungnya Barack Obama tidak terpengaruh oleh reaksi sebagian warganya itu, andai ia terpengaruh kemudian mengeluarkan kebijakan yang melarang imigran Muslim masuk ke negaranya, maka tesis Huntington mengenai benturan peradaban tahun 1993 bisa jadi menemu bukti yakni masa de-

pan politik dunia yang akan didominasi oleh konflik antar bangsa yang berbeda peradaban.¹¹

Pada aras ini, konflik tersebut menjadi fenomena kuat menandai runtuhnya polarisasi ideologi dunia (komunisme dan kapitalisme), bersamaan dengan itu runtuhnya struktur politik mayoritas negara-negara Eropa Timur. Penegasan Huntington bahwa negara Barat menemukan seteru yang kemudian menjadi permanen dengan adanya kolaborasi antara Islam dan konfusianisme.¹² Kolaborasi tersebut dapat menjadi penantang kekuatan, nilai-nilai, dan kepentingan Barat. Dengan entitas kultural, menurut Huntington, Islam dan Konfusianisme bisa merekatkan perpecahan antara keduanya, juga dapat berarti kerjasama untuk menangkal hegemoni Barat.

Keterkaitan antara agama dan tindakan radikal merupakan isu penting. Kendati umumnya kita menolak kelompok dan gerakan yang melakukan tindakan kekerasan, sebenarnya sebagian besar agama dan bangsa mengambil jalan kekerasan dalam perjuangan, peperangan, dan revolusi mereka yang *legitimate*, seperti perang-perang suci Kristen¹³, perang salib, revolusi Prancis, revolusi Amerika, jihad Afganistan, dan perang terhadap terorisme global.¹⁴ Perbedaan penting adalah diantaranya pemanfaatan agama secara sah dan tidak sah untuk memberikan penggunaan kekerasan. Tudingan yang biasa diacungkan adalah bahwa peperangan melawan ekstremisme dan terorisme Muslim dipengaruhi oleh tidak adanya otoritas keagamaan sentral dalam Islam. Oleh karena itu, membuat agama Islam lebih rawan untuk disalah

¹¹ Lihat Samuel P. Huntington, *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (Yogyakarta: Qalam, 2010)

¹² Samuel P. Huntington, *Benturan Peradaban ...*, 94

¹³ Untuk menambah pemahaman tentang perang suci dalam tradisi Barat Kristen dan Islam, Lihat James Turner Johnson, *Ide Prang Suci*, (Yogyakarta: Qalam, 2002); Tidak ada isu mengenai perbedaan antara Barat Kristen dan Islam yang lebih mengemuka dan hangat sepanjang sejarah selain isu perang suci.

¹⁴ John L. Esposito, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Mizan, 2010), 81

gunakan. Pada aras ini, permasalahan otoritas itu menjadi khas dalam Islam dengan munculnya gerakan-gerakan politik, seperti fundamentalisme Islam, HTI, JAI, DI/TII, dan gerakan-gerakan lainnya. Tujuan gerakan mereka bersifat Islami, untuk menciptakan pemerintahan Islami, kekhalifahan atau sekadar negara dan masyarakat yang lebih berorientasi keislaman. Peran agama yang multidimensional dijadikan pembenaran oleh mereka yang terlibat dalam tindakan radikalisme atau terorisme global.

Sebelum lebih lanjut menganalisis tentang radikalisme, ada baiknya menjawab pertanyaan berikut, apa artinya bersikap radikal secara agama? Pertanyaan ini sangat urgen untuk dijawab, mengingat bahwa setiap gerakan atau tindakan teror dan kekerasan yang muncul seringkali dikaitkan dengan agama tertentu (dalam hal ini Islam), tetapi tidak dengan agama atau keyakinan tertentu. Negara Israel, misalnya yang terus melakukan teror, penembakan, dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina tidak pernah dianggap teroris oleh dunia Internasional (terutama Amerika dan sekutunya). Tetapi ketika ISIS, Al-Qaida, Taliban, dan kelompok gerakan Islam lainnya melakukan tindakan serupa, dengan sangat cepat dunia Internasional menghakiminya sebagai teroris.

Menjadi seorang radikal berarti memiliki pandangan tertentu tentang kemungkinan-kemungkinan yang lekat dengan sejarah. Sementara radikalisme berarti melepaskan diri dari cengkraman masa lalu (Giddens, 2009). Sejarah hadir untuk dikuasai, dibentuk sesuai dengan tujuan-tujuan manusia sehingga keuntungan-keuntungan yang pada masa-masa sebelumnya dihadiahkan Tuhan, dan merupakan hak preogratif bagi segelintir elit, dapat dikembangkan dan diorganisasikan demi kemanfaatan bersama. Menurut Giddens (1994) "*Radicalism, taking things by the roots, meant not just bringing about change but controlling such change so as to drive history onward*". Jadi radikalisme tidak hanya membongkar dan

menghadirkan perubahan segala sesuatu, juga mengontrol perubahan tersebut sehingga mendorong sejarah maju ke depan.¹⁵

Di level dunia, tindakan radikal dalam bentuk kekerasan memiliki sejarah yang sangat panjang dan berdampak luas dalam konstelasi politik global. Pembunuhan massal (*genocide*) dan pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) Bosnia oleh Serbia. Kasus tersebut teridentifikasi sebagai konflik etnik yang bernuansa agama, sehingga disebut sebagai konflik etnik-agama (*ethno-religious conflict*), juga berkaitan dengan distribusi sumber kekuasaan, baik politik maupun ekonomi. Di Turki, kekerasan terjadi antara etnik Kurdi yang minoritas dengan Turki yang mayoritas; dan di Iraq antara Kurdi dan Arab; serta di India konflik yang bernuansa etnik dan agama.¹⁶ Konflik, kekerasan, dan tindakan radikal ditengarai dan dikaitkan dengan gerakan pembentukan negara yang terpisah (*ethno-nationalism*), perjuangan kemerdekaan atau akomodasi dalam struktur politik.

Di Indonesia sendiri kekerasan komunal bernuansa etnis-agama memiliki sejarah panjang. Pasca kemerdekaan dimana kemunculan banyak gerakan Islam, seperti DI/TII. Hal itu dipicu oleh masalah sosial-ekonomi (Tinghoa-Jawa atau Pribumi). Pasca Orde Baru, kerusuhan sosial dan konflik etnis-agama meledak di beberapa tempat, seperti Kalimantan Barat dan Tengah (Dayak-Madura), konflik agama di Poso dan Ambon Maluku.

Beberapa kalangan mensinyalir bahwa Masyarakat Islam Ambon (MIA) pun memiliki komitmen terhadap gerakan itu dan terutama sebagai respon terhadap gerakan politik FKM/RMS (Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan). Pada kasus kekerasan komunal di Ambon Maluku pihak-pihak yang berkonflik

¹⁵ Antoni Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, (Oxford: Polity Press, 1994), 60

¹⁶ Mukti Ali, "Masyarakat Damai dan Adil dari Perspektif Kepercayaan terhadap Tuhan," dalam majalah PROSPEKTIF, Nomor 1 Vol 4, 1992

yaitu Komunitas Islam Ambon (KIA), Laskar Jihad¹⁷, komunitas Kristen, FKM/RMS, dan lainnya.

Truth claim dan silang pendapat membuat konflik di Ambon meruncing. Pihak Kristen terus memunculkan isu marginalisasi komunitas Kristen oleh Orde Baru dan politikus Islam. Isu-isu Islamisasi dan diskriminasi birokrat Ambon beragama Islam terhadap warga Ambon beragama Kristen terus diperbincangkan setiap hari dalam pelbagai kesempatan. Sebaliknya, komunitas Islam, Laskar jihad, dan pelbagai ormas Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap komunitas Kristen. Yang terjadi adanya gerakan “oikumene” atau Kristenisasi dan penguasaan struktur politik daerah oleh komunitas Kristen (Novri, 2003). Kejadian awal yang melatari kejadian 19 Januari 1999 merupakan suatu desain yang melibatkan kekuatan politik separatis, seperti pada kerusuhan di Air Bak dan Dobo yang menimbulkan korban orang-orang Islam. Kerusuhan di dua tempat itu merupakan konspirasi untuk mengalihkan kekuatan Militer dari kota Ambon ke Dobo sehingga kekuatan militer sedikit dan tidak berdaya menghalangi aksi kekerasan Kristen (Ecip, 1999). Menghidupkan kembali *local knowledge* seperti ritus pela menjadi strategi ampuh untuk penyelesaian tindakan kekerasan atau konflik Ambon Maluku.

Pada banyak kasus, teridentifikasi bahwa peran agama terutama sebagai strategi untuk melegitimasi perjuangan dan memobilisasi dukungan massa. Hasil temuan Esposito (2010) dalam pelbagai kasus membuktikan bahwa ketertarikan terhadap agama dalam perselisihan antar penganut kepercayaan seperti Katolik

¹⁷ Laskar Jihad secara organisasional adalah organisasi sukarelawan muslim dari komunitas salafy di bawah payung Forum Komunikasi Ahlussunnah walJamaah yang didirikan di Yogyakarta. Organisasi ini secara formal memiliki kegiatan sosial dalam masyarakat konflik seperti bantuan kesehatan dan pendidikan untuk warga muslim. Namun pada gilirannya, Laskar Jihad terlibat dalam kontestasi wacana melalui isu anti RMS. Pada kasus Maluku, ada penilaian dan friksi sentimen keagamaan yang di blow-up konflik kekerasan, sehingga aparat keamanan dianggap tidak efektif menanggulangi krisis keamanan di Ambon Maluku.

dan Kristen di Irlandia Utara; Muslim Bosnia, Ortodoks Serbia, dan Katolik Kroasia di Balkan; Tamil dan Sinhala di Sri Lanka; Kristen dan Muslim selama perang sipil di Lebanon; Sunnah dan Syi'ah di Irak pasca Saddam; begitu juga diantara para teroris 11 September (WTC dan Pentagon); termasuk beberapa kasus di Indonesia, adalah strategi meraih dukungan massa dan kekuasaan politik.

Memahami Tindakan Radikalisme dan Benturan dengan Dunia Barat

Tindakan radikal, kekerasan, dan konflik dapat disebabkan oleh peristiwa yang sepele (*trivial*) atau sentimen yang bersifat laten, seperti perbedaan agama, politik, kultur, dan peradaban. Tindakan radikal dalam bentuk kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok dengan mengatasnamakan Islam, bukan tindakan tanpa sebab dan tujuan. Ada aksi dan reaksi yang seringkali menjadi faktor potensial (*potential factor*).

John L. Esposito memaparkan bahwa terorisme global dan sejenisnya disebabkan oleh kekecewaan politik dan ekonomi yang terkadang sering disamarkan oleh bahasa dan simbolisme keagamaan yang digunakan kaum ekstremis atau radikal.¹⁸ Agama menjadi cara efektif untuk melegitimasi dan memobilisasi dukungan, sebagaimana terlihat di Irlandia Utara, Sri Lanka, India, Israel, Palestina, Kashmir, Cehcknya, atau dalam strategi global Osama bin Laden, Alqaeda, dan terakhir ISIS. Penggunaan simbol-simbol agama merujuk pada pembenaran dan kewajiban moral, serta mengimbuhkan kepastian yang berasal dari otoritas moral dan imbalan sorga dapat memperkuat perekrutan dan meningkatkan kerelaan untuk berjuang dan mati dalam perjuangan suci.

Pencitraan negatif terhadap seorang Muslim yang menjadikan nyawanya sebagai tumbal demi perjuangan suci dicap sebagai orang fanatik agama (radikal) yang mendukung sekaligus aktivis

¹⁸ John L. Esposito, *Masa Depan ...*, 79

kriminal dan teroris. Sebaliknya, perjuangan suci demi agama bagi dunia Islam menempati posisi yang sangat mulia. Dengan stigma itu, tidak sedikit kaum Muslim sendiri terganggu dan direpotkan oleh makna jihad yang direduksi itu, jihad kemudian diidentikkan dengan suatu usaha menjustifikasi terorisme, revolusi, dan aktivitas anti Barat.

Tindakan radikal atau kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras seringkali merupakan reaksi yang berlebihan dari dunia Barat yang bertopeng demokrasi, kebebasan pers, dan Hak Asasi Manusia. Dunia Barat tidak jarang melakukan *trial and error* dengan menyentuh sesuatu yang sakral dalam Islam, misalnya kasus pemuatan karikatur Nabi Muhammad di harian *Jayland Postens* di Denmark. Coretan tinta dalam karikatur tersebut merupakan *potential trigger* bagi kaum muslim. Sudah pasti pemuatan karikatur itu memiliki tujuan (*means*) dengan menggunakan media massa sebagai alat (*ends*). Jauh sebelumnya Salman Rusdi (warga Inggris), juga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw. Reaksi ummat Islam dan negara-negara Islam (terutama Iran) sampai membuat sayembara dengan imbalan uang 1 Miliar bagi sesiapa pun yang dapat memenggal kepala Salman Rusdi. Respon yang berdasarkan pada nilai dan norma disebut sebagai *wertrational* oleh Weber.

Reaksi seperti tersebut di atas wajar ditunjukkan oleh kaum Muslim di seluruh dunia. Sementara bagi kaum radikal atau garis keras sentimen keagamaan itu dibalas dengan tindakan keras sampai dengan bom bunuh diri. Norma kebebasan pers yang dianut oleh Denmark dianggap sebagai ancaman bagi kesucian Nabi Muhammad Saw. Sebaliknya, dengan dalih yang sama kalangan muslim menganggap penghormatan terhadap agama adalah hak asasi yang harus dihormati semua orang, termasuk di dalamnya dunia Barat. Kebebasan pers harus didukung dan dilaksanakan tetapi dalam koridor bersih, bertanggung jawab, seimbang, dan

tidak meligitimasi penghinaan terhadap sekelompok agama maupun keyakinan tertentu.¹⁹

Sejalan dengan realitas di atas, Karen Amstrong berpendapat bahwa eskalasi gerakan kekerasan dan radikal atas nama agama pada masa modern disebabkan *cultural shock* pemeluk agama dalam menanggapi gelombang modernisasi dan sekulerisasi yang menjauhkan masyarakat dari Tuhan.²⁰ Secara alamiah, menurut Weber pada setiap diri manusia selalu ada kepentingan, dan begitu juga pada level relasi sosial dan kekuasaan politik (*power*). Dalam konteks relasi agama dengan negara terjadi tarik ulur dan seringkali agama tersubordinasikan dalam kepentingan politik.²¹

Pada aras ini, agama sangat rentan dijadikan sarana mencaipai tujuan politik apabila pemahaman keagamaan kalangan yang diperintah masih dalam tataran rendah dan dangkal dengan loyalitas buta. Tentu saja hal itu, sulit dihindari karena Islam memandang agama sebagai sistem integral dengan aturan politik. Oleh karena itu, pemahaman agama seperti itu jelas-jelas meniscayakan hak agama untuk mengurus negara termasuk penggunaan kekuatan militer. Berbeda dengan dunia Barat, sudah lama mengalami sekularisasi dengan menempatkan agama dan politik di wilayah yang berbeda.

Penggunaan *power* (kekuasaan politik) untuk tujuan terlaksananya kehidupan agama yang mapan sangat diharapkan dan sangat positif. Sebaliknya, bila terjadi pergeseran cita-cita politik agama menjadi ambisi materialisme pribadi yang negatif, sudah pasti agama mengalami distorsi doktrin yang parah. Tentu saja, hal ini menyebabkan munculnya tindakan radikal atau kekerasan atas nama agama dalam dunia politik. Dalam perkataan lain, terdapat kesamaan modus operandi tindakan radikal atau kekerasan, yaitu pemaksaan kehendak kelompok agama tertentu terhadap

¹⁹ Toha Hamim, *Resolusi Konflik ...*

²⁰ Karen Amstrong, *The Battle for God*, (New York: Alfred Knopf, 2001), 202

²¹ Ahmad Fedyani, *Agama dan Politik Keagamaan*, (Jakarta: Litbang Depag, 2001), 38

kepentingan kelompok lain.

Pandangan unifikasi agama dengan politik dalam kehidupan sosial politik Indonesia mempunyai akibat langsung terhadap cita-cita mendirikan negara Islam, seperti DI/TII, HTI, dan JAT; dalam konteks politik Islam dikenal dengan fundamentalisme Islam. Kalangan Kristen sendiri berusaha untuk mendirikan negara agama, namun tidak sampai melakukan pemberontakan; hanya sebatas tindakan kekerasan, seperti kasus di Ambon Maluku. Ada dua cara berbeda yang pernah ditempuh kalangan Islam guna merintis pendirian negara Islam. Di awal kemerdekaan, kalangan Islam menempuh upaya diplomasi parlemen, tetapi gagal; karena kurangnya dukungan politik publik dan ketakutan disintegrasi yang melanda negara. Pola kedua adalah pola kekerasan atau tindakan radikal. Sikap kedua ini merupakan kelanjutan diplomasi parlemen yang gagal, sehingga jalur pemberontakan banyak terjadi di pelbagai wilayah Indonesia, seperti di Aceh dengan GAM, Maluku dengan RMS, Papua dengan OPM, Makassar.

Penganut pemikiran unifikasi agama dengan politik berdalih bahwa negara dan agama adalah hal yang tidak terpisahkan. Kewajiban mendirikan negara yang berdasarkan agama tidak berbeda dengan perjuangan menegakkan kewajiban agama yang lain. Agama menuntut kepatuhan manusia secara simultan dan holistik, tidak boleh terjadi pemilahan kepatuhan. Kepatuhan harus disandarkan pada sistem yang dianut agama, tidak pada sistem yang dimunculkan manusia.

Penutup

Gerakan radikalisme agama yang terjadi di dunia dan terutama di Indonesia, jika ditinjau dari perspektif ilmu sosial sesungguhnya tidak muncul dari entitas agama yang sebenarnya sebagai keyakinan esoterik dan mengedepankan kedamaian. Gerakan radikalisme agama lebih merupakan reaksi dari kekecewaan dan ket-

akberdayaan individu maupun sekelompok terhadap modernitas dan sekulerisasi atau upaya diplomasi parlemen yang gagal dalam meraih cita kekuasaan (politik) dan ekonomi, atau dengan kata lain sebagai bentuk pelarian (*escape*) dari cara berinteraksi dan berkomunikasi yang muncul dari sebab *shock culture*.

Saran

Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan beberapa saran praktis untuk meminimalisir tindakan radikal dalam bentuk kekerasan atau teror yaitu:

1. Penyesuaian akan perbedaan dan kemajemukan perlu dilakukan melalui pelbagai lembaga yang ada di masyarakat, termasuk yang paling urgen melalui lembaga pendidikan dengan kurikulumnya, termasuk materi-materinya yang bertandaskan ajaran agama.
2. Revitalisasi kearifan budaya lokal untuk saling menghargai, tenggang rasa, dan menyayangi, seperti budaya *pela* di Ambon.
3. Peningkatan relasi interpersonal agama, agama dengan negara dan negara dengan agama, agar tercipta dialog serta komunikasi yang berorientasi pada kesepahaman dan kesalingmengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. "Masyarakat Damai dan Adil dari Perspektif Kepercayaan terhadap Tuhan, *Majalah Prospektif*," Nomor 1 Vol 4, 1992.
- Armstrong, Karen. *The Battle for God*. New York: Alfred Knopf, 2001.
- Cambell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa Penilaian Perbandingan*. (terj.) Budi Hardiman Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Esposito, John L. *Masa Depan Islam*. Bandung: Mizan, 2010.
- Fedyani, Ahmad. *Agama dan Politik Keagamaan*, Jakarta: Litbang

- Depag, 2001.
- Giddens, Antoni. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Oxford: Polity Press, 1994.
- Hamim, Thoha. dkk., *Resolusi Konflik Islam Indonesia*. Surabaya: Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS) dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (terj.) M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam Yogyakarta, 2010.
- Johnson, James Turner. *Ide Perang Suci*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Lowith, Karl. *Max Weber and Karl Marx*, London and New York: Routledge, 1993.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (terj.) Alimandan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Santoso, Thomas. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 1999.
- Turner, Bryan. *Classical Sociology*. London: Sage Publication, 1999.
- Weber, Max. *Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.